

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Data Penelitian

1. Deskripsi Tempat Penelitian

Desa Panggeldlangu termasuk dalam desa yang terdapat di Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Luas desa ini yaitu 90.800 m². Jumlah penduduk keseluruhan 790 orang, terbagi menjadi perempuan 394 dan jumlah laki-laki 396 dengan kepala keluarga 335 KK. Mata pencaharian warga Desa Panggeldlangu sebagian besar adalah sebagai petani dengan total 547 orang dan sebagai buruh tani terdapat 56 orang.

Desa Panggeldlangu merupakan desa yang cukup terisolir di Daerah Kabupaten Purworejo. Letaknya yang berada jauh dari Kabupaten serta dari jalan raya. Perjalanan menuju desa ini harus melewati beberapa desa serta adanya sungai yang harus dilewati. Jarak desa panggeldlangu dengan Kota Kabupaten berkisar 18 km dan dapat ditempuh dengan waktu 30 menit dengan kendaraan bermotor.

Batas wilayah Desa Panggeldlangu adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah barat : Desa Binangun
- b. Sebelah utara : Desa Walet dan Desa Kendalrejo
- c. Sebelah timur : Desa Kaliwatukranggan

d. Sebelah selatan : Desa Dlangu.

1) Kegiatan Ekonomi

Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Desa Panggeldlangu adalah sebagai petani, terdapat pula beberapa profesi lain seperti wirausaha dan PNS tetapi jumlahnya sedikit. Pertanian yang digeluti oleh masyarakat Desa Panggeldlangu yaitu padi dan palawija seperti kedelai, jagung, dan cabai. Masyarakat sangat mengandalkan hasil pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menyekolahkan anaknya. Kesejahteraan masyarakatnya masih kalangan bawah, banyak warga yang termasuk dalam kalangan miskin. Petani di Desa tersebut tidak semuanya memiliki persawahan tetapi banyak pula yang masih menjadi buruh tani dengan bayaran yang berkisar Rp 6.000, 00 sekali buruh tani.

Tabel 3. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Panggeldlangu

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	286 orang	261 orang
Buruh Tani	24 orang	35 orang
Bidan Desa	-	2 orang
PNS	7 orang	6 orang
Pedagang kecil	1 orang	3 orang
TNI	1 orang	-
POLRI	1 orang	-
Pensiunan POLRI/PNS/TNI	8 orang	13 orang

Sumber : Profil Desa Panggeldlangu tahun 2010.

2) Kegiatan Sosial

Desa Panggeldlangu termasuk dalam desa yang memiliki banyak kegiatan sosial, seperti kerja bakti, pengajian TPA dan Kegiatan remaja masjid. Kehidupan sosial masyarakatnya sangat kental dengan gotong royong, terlihat dari kerja bakti yang dilaksanakan di Desa tersebut semua masyarakatnya ikut andil tanpa terkecuali bahkan anak-anak banyak yang ikut tanpa diminta oleh orang tuanya.

3) Pendidikan

Desa Panggeldlangu merupakan desa kecil yang letaknya cukup jauh dari Kabupaten Purworejo. Terdapat satu Sekolah Dasar (SD), dan satu Taman Kanak-Kanak (TK) sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) belum ada. SMP dan SMA ada tetapi di daerah Kecamatan Butuh. Kesadaran masyarakat dalam dunia pendidikan cukup tinggi, tetapi karena keterbatasan dana untuk menyekolahkan anaknya masih sedikit anak yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Rata-rata warganya menyekolahkan anaknya hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) setelah lulus lalu meneruskan merantau ke Ibukota.

Tabel 4 Tingkatan Pendidikan Masyarakat Desa Panggeldlangu

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Tamat SD/ sederajat	94 orang	174 orang
Tamat SMP/ sederajat	81 orang	69 orang
Tamat SMA/ sederajat	104 orang	71 orang
Tamat D-1/ sederajat	6 orang	7 orang
Tamat D-2/ sederajat	1 orang	1 orang
Tamat D-3/ sederajat	4 orang	3 orang

Tamat S-1/ sederajat	2 orang	2 orang
----------------------	---------	---------

Sumber : Profil Desa Panggeldlangu 2010.

4) Potensi Desa

Desa Panggeldlangu merupakan daerah yang memiliki potensi pada bidang pertanian. Sebagian wilayahnya diluar pemukiman penduduk terdapat banyak persawahan yang cukup luas 60 hektar (Profil Desa Panggeldlangu, 2010). Tidak ditemukan potensi menjadi desa wisata dari Desa ini.

2. Deskripsi Umum Data Informan

Penelitian yang dilaksanakan peneliti untuk mengetahui Partisipasi masyarakat dalam Implementasi PNPM-MD di Desa Panggeldlangu, peneliti melibatkan warga masyarakat di desa tersebut untuk mendapatkan data. Pihak yang terlibat sebagai subyek penelitian tidak hanya Tim Pengelola kegiatan PNPM-MD tetapi juga masyarakat umum.

Berikut beberapa informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, antara lain :

a. Kepala Desa Panggeldlangu periode 2002-2012.

Pendapat beliau tentang PNPM-MD yaitu pelaksanaan segala kegiatan PNPM-MD berjalan dengan lancar serta masyarakatnya berpartisipasi secara penuh. Masyarakat memiliki kesadaran tinggi untuk mau ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan PNPM-MD di Desa Panggeldlangu hingga kegiatan selesai.

b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Beliau berpendapat bahwa masyarakat sangat berantusias dalam pelaksanaan kegiatan PNPM-MD. Laki-laki dan perempuan berpartisipasi dalam kegiatan PNPM-MD tidak melihat perbedaan gender. Laki-laki ikut serta dalam hal fisik sedangkan wanita dalam hal konsumsi.

c. Bendahara TPK

Beliau berpendapat bahwa pelaksanaan kegiatan rabat beton berjalan dengan lancar dan sesuai dengan dana yang disediakan oleh Kecamatan. Dana untuk kegiatan rabat beton jalan tidak hanya dari PNPM-MD tetapi juga dari donatur dan desa.

d. Tim pelestarian

Pendapat beliau tentang pelaksanaan PNPM-MD tahun 2012 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur pelaksanaan kegiatan dari Kecamatan. Masyarakatnya juga memiliki kesadaran yang tinggi untuk ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan PNPM-MD. Bentuk partisipasi masyarakatnya antara lain berupa tenaga, konsumsi dan pikiran.

e. Penanggungjawab kegiatan POSYANDU

Kegiatan PNPM-MD dalam bidang kesehatan yaitu POSYANDU untuk lansia dan balita. Kegiatan PNPM-MD dalam bidang kesehatan berjalan dengan lancar. Banyak lansia yang

berantusias untuk datang ke kegiatan POSYANDU. kegiatan posyandu balita juga banyak yang menghadiri kegiatan tersebut. Kendala dari kegiatan ini terdapat pada sulitnya dalam memilih kader-kadernya karena kurangnya kesadaran dari ibu-ibu untuk ikutserta menjadi kader POSYANDU.

f. Kader posyandu

Pendapat beliau tentang pelaksanaan posyandu sudah berjalan dengan lancar bahkan dengan adanya pendanaan dari PNPM-MD dapat dijadikan peningkatan untuk pelayanan kesehatan bagi balita dan lansia. Masyarakat juga berpartisipasi penuh dalam kegiatan tersebut.

g. Masyarakat

Penelitian mengambil data dari banyak informan dari masyarakat. Hasil wawancara dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa kegiatan PNPM-MD memberikan manfaat yang berguna, baik dari kegiatan fisik seperti rabat beton, kegiatan posyandu bagus untuk meningkatkan kesehatan bagi balita dan lansia. Bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan PNPM-MD berupa tenaga dan konsumsi. Disisi lain, mereka menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui apa itu PNPM-MD. Masyarakat hanya sedikit yang mengikuti sosialisasi PNPM-MD dari desa dengan alasan tidak ada undangan atas sosialisasi tersebut. Mereka tetap berpartisipasi atas sosialisasi secara

lisan dari aparat desa adanya giliran untuk ikut serta dalam kegiatan PNPM-MD.

h. Tim Pengawas Kegiatan (TPK) dari pihak kecamatan

Pendapat beliau mengenai pelaksanaan kegiatan PNPM-MD di Desa Panggeldlangu berjalan lancar dan menghasilkan hasil kegiatan fisik yang bagus. Pembuatan rabat beton hasilnya bagus sesuai prosedur pembuatan bahkan desa ini merupakan desa yang dijadikan contoh dalam pengawasan audit dari provinsi. Partisipasi masyarakatnya cukup antusias. Semua masyarakatnya ikut dalam kegiatan tersebut. Pada bidang kesehatan juga berjalan baik. Penggunaan dana kegiatan PNPM-MD juga sesuai dengan uang pendanaan dari PNPM-MD.

3. Gambaran pelaksanaan PNPM-MD tahun 2012 di Desa Panggeldlangu

Desa Panggeldlangu merupakan salah satu desa di Kecamatan Butuh yang mendapat pendanaan dari PNPM-MD. Pada tahun 2010 desa ini juga pernah mendapatkan pendanaan dari PNPM-MD untuk kegiatan rabat beton jalan, POSYANDU dan SPP. Pada tahun 2012, desa ini kembali mendapatkan pendanaan untuk kegiatan PNPM-MD. Kegiatan yang didanai oleh PNPM-MD pada tahun 2012 di Desa Panggeldlangu yaitu jalan rabat beton, dan kegiatan kesehatan yaitu POSYANDU.

Kegiatan PNPM-MD merupakan kegiatan yang bertahap mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian. Perencanaan PNPM-MD merupakan tahap dalam pengambilan keputusan untuk pengajuan usulan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan jika usulan desa tersebut dipilih dalam pendanaan PNPM-MD, pengawasan merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan dari pihak kecamatan untuk mengawasi jalannya kegiatan pelaksanaan PNPM-MD, selain itu pengawasan juga dilakukan oleh Tim Pengelola yang ditunjuk dari desa serta dari masyarakat.

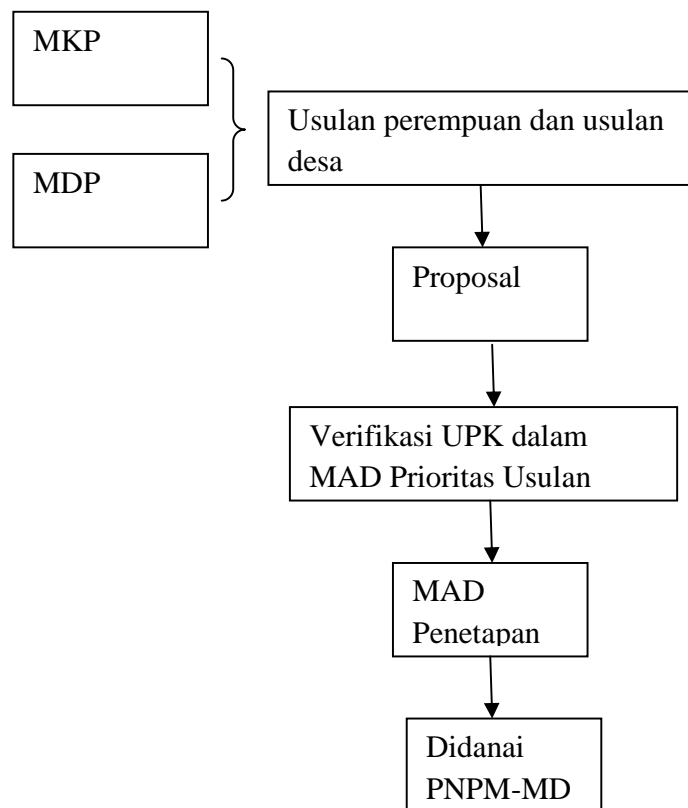
Sebelum pelaksanaan PNPM-MD terdapat proses yang harus ditempuh untuk mendapatkan pendanaan dari PNPM-MD yaitu tahap perencanaan. Proses perencanaan PNPM-MD adalah sebagai berikut yang diikuti dari wawancara Bapak Muh. Kowangit :

Pengajuan usulan dimulai dari beberapa musyawarah, Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) dan Musyawarah Desa Perencanaan (MDP). MKP akan mengusulkan dua kegiatan sedangkan usulan dari desa akan mengadakan 1 kegiatan. Pengajuan MKP ini merupakan musyawarah dari kelompok kecil yang ada di desa seperti PKK maupun kelompok dasa wisma. Hasil pengajuan usulan tersebut akan dimusyawarahkan lagi dalam MDP yang akan menetapkan usulan kegiatan. Hasil MDP desa Panggeldlangu pada tahun 2011 yaitu untuk kegiatan rabat beton jalan, SPP dan POSYANDU. Setelah ditetapkan pengajuan usulan lalu dibuat proposal yang seharusnya dibuat oleh Tim Penulis Usulan (TPU). TPU Desa Panggeldlangu sudah tidak berjalan dari tahun 2010 tidak tahu karena tidak bisa membuat usulan atau karena kesibukan dari individunya, sehingga dalam pembuatan proposal dilaksanakan oleh KPMD.

Proposal yang telah jadi diserahkan ke Kecamatan untuk diverifikasi oleh UPK. Verifikasi UPK disaksikan oleh perwakilan

tiap-tiap desa yang mengajukan usulan. Setiap desa mengirimkan perwakilan 6 orang yang terdiri dari perwakilan TPK, Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari MKP, Verifikasi usulan ini disebut dengan MAD Prioritas Usulan. MAD Prioritas Usulan diadakan di Kecamatan untuk menilai usulan dan memberikan peringkat atas dasar musyawarah bersama dari perwakilan desa sekecamatan Butuh. Penetapan dari MAD Prioritas Usulan lalu dimusyawarahkan lagi ke MAD Penetapan. MAD Penetapan akan menetapkan desa mana saja yang dapat pendanaan dari PNPM-MD berdasarkan peringkat usulan. Tidak semua desa akan dibiayai, hal ini tergantung dari banyaknya dana PNPM-MD yang tersedia. Pada tahun 2012 Desa Panggeldlangu mendapatkan pendanaan PNPM-MD untuk kegiatan rabat beton jalan dan POSYANDU (wawancara,22 Januari 2013).

Menyimpulkan dari hasil wawancara diatas, peneliti menggambarkan bagan/gambar tahap perencanaan PNPM-MD,sebagai berikut :



Gambar 2. Tahap Perencanaan PNPM-MD

Keterangan gambar :

Pengajuan usulan dari desa dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil desa tersebut terutama dari MKP seperti berasal dari dasa wisma maupun dari PKK, selain itu juga ada usulan dari desa. Hasil dari pengajuan usulan tersebut akan dimusyawarahkan dalam MDP atau Musdes perencanaan untuk menetapkan usulan kegiatan PNPM-MD. Kegiatan usulan yang telah disepakati dalam MDP akan diajukan dalam bentuk proposal yang dibuat oleh Tim pengelola PNPM-MD desa tersebut, terutama dari TPU. TPU Desa Panggeldlungu sudah tidak difungsikan sejak tahun 2010 karena dari tim TPU sendiri tidak ada kesadaran untuk menjalankan tugasnya.

Proposal yang telah jadi lalu diserahkan ke kecamatan. Proposal yang telah berada di kecamatan akan diverifikasi oleh UPK. Kegiatan verifikasi tersebut dilaksanakan pada kegiatan MAD Prioritas usulan. MAD Prioritas Usulan dihadiri oleh perwakilan desa yang mengajukan usulan PNPM-MD. Setiap desa mengirimkan 6 orang perwakilan yang terdiri dari Kepala Desa, TPK, tokoh masyarakat dan perwakilan dari MKP. Verifikasi ini untuk penilaian usulan tiap desa atas musyawarah antar desa (MAD) dan diperingkat berdasarkan nilai yang tertinggi dari

hasil musyawarah tersebut. Hasil dari MAD prioritas Usulan kemudian akan dimusyawarahkan lagi dalam MAD Penetapan yaitu musyawarah untuk penetapan desa-desa yang mendapat dana dari PNPM-MD. Desa yang mendapatkan pendanaan berdasarkan peringkat yang tertinggi dan sesuai dana yang tersedia dari PNPM-MD, jadi tidak semua desa mendapat pendanaan dari PNPM-MD.

Usulan kegiatan PNPM-MD pada tahun 2012 lolos dengan mendapatkan pendanaan untuk kegiatan rabat beton jalan dan POSYANTU, sedangkan untuk SPP tidak mendapatkan dana dari PNPM-MD. Pengajuan usulan yang didanai kemudian disalurkan untuk kegiatan tersebut. Peneliti akan memberikan gambaran pelaksanaan PNPM-MD Desa Panggeldlangu.

1) Pelaksanaan Program Rabat Beton Jalan

Pada tahun 2012, panjang untuk rabat beton jalan di Desa Panggeldlangu 1,6 x 637 meter. Penghitungan panjang jalan tersebut dimulai dari tempat Kemulukan hingga ujung barat jalan desa. Dana yang diterima dari PNPM-MD untuk rabat beton senilai Rp 80.982.000,00. Pelaksanaan rabat beton jalan mengalami penambahan panjang jalan untuk melengkapi sedikit panjang jalan desa. Perencanaan panjang jalan dengan volume dalam pengajuan usulan 1,6 x 620 meter, sehingga terdapat penambahan dana di dapatkan dari kas desa. Adanya penambahan dana dari desa sehingga

penggunaan dana dari pembuatan jalan rabat beton jalan menjadi Rp 86.390.000,00.

Pekerja masyarakat yang mengikuti sesuai rencana yaitu 120 orang, sedangkan untuk tukang atau pekerja yang menerima bayaran yaitu 15 orang. Masyarakat dalam pelaksanaan rabat beton tidak mendapat bayaran karena pelaksanaan pada dasarnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga dilaksanakan dengan gotongroyong, sedangkan untuk tukang yaitu pekerja yang saat kerjanya mengurus tentang penggunaan alat berat mendapat bayaran karena pekerjaannya cukup berat.

Pelaksanaan rabat beton jalan mempunyai standar ketentuan dari PNPM-MD yaitu dengan ketebalan 12 cm, panjang tiap kotak rabat 80 cm tiap sisi, dan pembatas tengahnya 70 cm sehingga lebar jalan berarti 230 cm. Pasir urug setinggi 5 cm. Pembuatan rabat beton disesuaikan dengan ketentuan tersebut.

Hasil dari pelaksanaan rabat beton mempunyai kualitas yang baik. Bahkan desa ini mendapatkan apresiasi dari pihak kecamatan karena hasil dari rabat beton termasuk yang baik dibandingkan dengan desa lain. Berikut kutipan dari narasumber Ibu Dwi H Hapsari, SE yang merupakan TPK Kecamatan untuk Desa Panggeldlangu :

Desa Panggeldlangu merupakan desa yang bisa menjalankan kewajibannya dengan baik. Hasil yang didapatkan dari pembuatan rabat beton jalan kualitasnya baik, sehingga dari pihak kecamatan memilih Desa Panggeldlangu sebagai obyek pengawasan audit dari kabupaten (wawancara, 22 Januari 2013).

Pada dasarnya pembuatan jalan maupun perbaikan jalan merupakan bagian dari tugas Dinas Pekerjaan Umum. Departemen pekerjaan Umum merupakan penanggungjawab tingkat nasional dalam PNPM-MD. Peran dari Dinas Pekerjaan Umum yakni Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi. Dinas Pekerjaan Umum dalam PNPM-MD bertindak sebagai lembaga penyelenggara program untuk melaksanakan koordinasi, pengendalian, monitoring, dan pembinaan teknis. Pelaksanaan PNPM-MD akan dimonitoring dari Dinas Pekerjaan Umum terutama dari tim Kabupaten. Dinas Pekerjaan Umum akan memonitoring pelaksanaan kegiatan serta hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut dan menyelaraskan hasil pelaksanaan kegiatan dengan teknis dan ketentuan dari pusat.

Pengawasan dari tingkat provinsi maupun dari tingkat Kabupaten merupakan salah satu peran dari aparat pemerintahan dalam keikutsertaannya mengelola PNPM-MD. Desa Panggeldlangu pada tahun 2010 mendapatkan monitoring dari tingkat provinsi untuk kegiatan rabat beton jalan sedangkan untuk tahun 2012, pengawasan

pelaksanaan kegiatan rabat beton jalan dimonitoring oleh pihak kabupaten karena hasil dari pelaksanaan PNPM-MD desa Panggeldlangu sudah baik dibandingkan desa lainnya.

Pembuatan rabat beton jalan ini bermanfaat sekali, jalan desa yang merupakan sarana jalan untuk pendidikan, jalur penjualan hasil pertanian dan jalur untuk kehidupan sehari-hari menjadi bagus. Jalan desa yang dulunya rusak, jika terkena hujan bisa banjir setelah adanya pembuatan rabat beton jalan menjadi bagus sehingga transportasi menjadi lancar.

Kendala dalam pelaksanaan PNPM-MD di Desa Panggeldlangu yaitu pada keadaan desa yang letaknya cukup terisolir dan harus melewati beberapa desa dari lain kecamatan agar kendaraan pembawa material dapat memasuki Desa Panggeldlangu. Kendala ini begitu dirasakan oleh warga masyarakat sehingga terjadi keterlambatan datangnya material untuk pembuatan rabat beton jalan. Kendala lain dalam pelaksanaannya yaitu cuaca. Pada saat pelaksanaan pembuatan rabat beton jalan pada musim penghujan sehingga saat hujan turun pengerjakan ditunda hingga hujan reda.

Pertanggungjawaban akan pelaksanaan rabat beton jalan dilakukan secara bertahap. Berikut pendapat dari Ibu Juniati selaku Bendahara TPK :

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rabat beton jalan dilaksanakn tiga kali yaitu pertanggungjawaban saat pelaksanaan telah mencapai 40%, lalu dilakukan lagi saat pelaksanaan telah mencapai 80% dan terakhir setelah pelaksanaan rabat beton jalan berakhir yaitu 100%. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan ini disaksikan oleh masyarakat dalam musyawarah atau kumpulan di balai desa tentang penggunaan dana pembuatan rabat beton jalan. pertanggungjawaban ini juga disaksikan oleh Kepala Desa (wawancara, 25 Jnauari 2013).

Pertanggungjawaban PNPM-MD bersifat transparan, selain pendapat diatas, berikut pendapat dari masyarakat yang dikutip dari Bapak Sahid yang menyatakan bahwa :

Laporan pertanggungjawaban kegiatan rabat beton jalan sudah bersifat transparan. Saya juga tahu tahap laporan pertanggungjawabannya yaitu ketika pelaksanaan telah mencapai 40%, 80% lalu yang terakhir setelah selesai pelaksanaan 100%. Pertanggungjawabannya juga diadakan dengan kumpulan dengan warga (wawancara 22 Januari 2013).

Menyimpulkan dari hasil wawancara tersebut serta melihat dari dokumen penyelesaian PNPM-MD dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan rabat beton jalan yaitu secara bertahap mulai dari pertanggungjawaban 40%, selanjutnya pelaksanaan 80% dan terahir pertanggungjawaban secara penuh 100%.

2) Pelaksanaan kegiatan Bidang Kesehatan

Pada dasarnya untuk kegiatan bidang kesehatan terutama dari POSYANDU merupakan program yang telah mendapatkan pendanaan dari Dinas Kesehatan. Dinas kesehatan juga telah

memberikan bantuan dana guna kemajuan pelaksanaan kegiatan POSYANDU. Adanya pendanaan PNPM-MD untuk kegiatan POSYANDU yaitu untuk penambahan meningkatkan fasilitas dalam kegiatan tersebut baik dalam fasilitas pemberian gizi maupun pemberian dana untuk peningkatan kesehatan bagi lansia dan balita. Dana bantuan dari Dinas Kesehatan belum sepenuhnya dapat membantu kegiatan POSYANDU sepenuhnya.

Dinas Kesehatan selain memberikan bantuan dana bagi kegiatan POSYANDU dalam kegiatan PNPM-MD, Dinas Kesehatan berperan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesehatan, misalnya sosialisasi dari Dinas Kesehatan dapat berupa penyuluhan dari Puskesmas yang berguna juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar terlibat dalam kegiatan POSYANDU. Dinas Kesehatan juga berperan dalam memonitoring kegiatan POSYANDU yang dilaksanakan setiap desa.

Pada bidang kesehatan di Desa Panggeldlangu mendapatkan dana dari PNPM-MD untuk kegiatan Pos pelayanan terpadu (POSYANDU). POSYANDU merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam peningkatan kesehatan. POSYANDU di Desa Panggeldlangu terbagi menjadi dua jenis kegiatan yaitu untuk balita dan untuk lansia.

Desa Panggeldlanggu mempunyai tiga kelompok POSYANDU balita dalam tiga RW sehingga setiap RW mempunyai kelompok POSYANDU balita. Dana PNPM-MD dibagikan ke tiga kelompok tersebut. Setiap kelompok memiliki porsi yang sama dalam penerimaan dana PNPM-MD. Perolehan dana dari PNPM-MD secara keseluruhan untuk kegiatan POSYANDU senilai RP 11.541.000,00.

Pelaksanaan POSYANDU balita diadakan setiap satu bulan sekali setiap hari selasa. Sosialisasi untuk kegiatan tersebut dilaksanakan saat pelaksanaan program tersebut. Setiap kelompok balita memiliki kader POSYANDU yang telah ditunjuk dari Desa. Tugas kader tersebut untuk mensosialisasikan dan mengurus pendanaan kegiatan. Sosialisasi dalam POSYANDU mencakup tentang penyuluhan kesehatan, gizi, Keluarga Berencana (KB), pentingnya pemberian vitamin A, garam beryodium dan BKB.

Kegiatan dalam Pelaksanaan POSYANDU balita antara lain adanya penimbangan pada balita. Adanya pendanaan dari PNPM-MD pada kegiatan POSYANDU digunakan untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa bubur kacang hijau dan buah, pemberian multi vitamin yang diberikan setiap 2 bulan sekali, serta pengadaan alat peraga edukasi untuk maenan balita dan pembelajaran pengenalan kepada balita untuk mengenal alat permainan.

Berikut kendala dalam pelaksanaan POSYANDU balita berdasarkan pendapat dari Ibu Yuni selaku penanggungjawab kegiatan POSYANDU Desa Panggeldlangu :

Kendala pelaksanaan POSYANDU balita antara lain :

- a. Tidak semua balita hadir
- b. Masih ditemukan adanya balita yang mengalami gizi buruk di tiga kelompok POSYANDU
- c. Kurangnya pengetahuan Ibu dari balita tentangnya pentingnya kegiatan POSYANDU sehingga mereka sering tidak mengikuti kegiatan tersebut.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mau menjadi kader POSYANDU sehingga dalam pemilihan kader hanya diambil dari istri perangkat desa (wawancara, 25 Januari 2013).

Melihat dari pendapat narasumber lain, Ibu Rusmiyati menyatakan bahwa, “Kendala dari POSYANDU balita yaitu masih ditemukan balita yang tidak mengikuti karena ibunya tidak berinisiatif untuk mengikutsertakan anaknya dalam kegiatan POSYANDU dan tidak adanya kesadaran dari masyarakat untuk menjadi kader POSYANDU”, (wawancara, 24 Januari 2013)

Menyimpulkan dari hasil wawancara bahwa dalam pelaksanaan kegiatan POSYANDU, kendala untuk pelaksanaan POSYANDU terdapat dari masyarakatnya sendiri yaitu kurangnya kesadaran Ibu untuk membawa anaknya mengikuti kegiatan POSYANDU serta kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjadi kader POSYANDU.

Kegiatan POSYANDU yang kedua yaitu POSYANDU untuk lansia. Pelaksanaan POSYANDU lansia dilaksanakan di Balai Desa setiap satu bulan sekali biasanya pada hari Sabtu terakhir setiap bulannya. Lansia yang ikut serta dalam kegiatan ini berkisar 40 orang. Kegiatan POSYANDU lansia diberikan fasilitas adanya pemeriksaan kesehatan, adanya pelatihan senam lansia selain itu juga diisi dengan pengajian. Adanya pendanaan dari PNPM-MD digunakan untuk pemberian vitamin, susu anlene, pemberian obat dan pemeriksaan darah. Pelatihan senam lansia diajarkan oleh Bidan desa guna memberikan kebugaran bagi para lansia.

Berikut kendala dalam pelaksanaan POSYANDU lansia berdasarkan pendapat Ibu Khasanah :

Pelaksanaan POSYANDU untuk lansia sebenarnya tidak ada kendala dari pelayanan kader POSYANDU tetapi kendalanya itu dari masyarakatnya sendiri. Banyak masyarakat yang kurang sadar untuk ikut serta padahal adanya POSYANDU kan bermanfaat sekali. Sudah dapat makanan dan minuman bergizi kegiatannya juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan seperti adanya senam lansia juga bisa priksa kesehatan dan mendapatkan obat jika sedang sakit (wawancara, 9 Februari 2013)

Sedangkan menurut Ibu Rusmiyati selaku kader POSYANDU “Kendala pelaksanaan kegiatan POSYANDU yaitu masyarakat kurang berpartisipasi dalam kegiatan POSYANDU lansia terutama untuk pihak laki-laki, dari pihak perempuan partisipasinya sudah baik”, (wawancara, 24 Januari 2013).

Menyimpulkan dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kendala dari pelaksanaan POSYANDU lansia yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Pertanggungjawaban akan pelaksanaan kegiatan POSYANDU juga dilaporkan ke Kepala Desa. Masyarakat juga mendapatkan informasi mengenai penggunaan dana dalam kegiatan POSYANDU tiap kelompok dari kader masing-masing mengenai penggunaan dana tiap bulannya dari kas POSYANDU. Hal ini merupakan bentuk transparansi dari Tim Pengelola Kegiatan POSYANDU kepada masyarakat. Setelah pelaksanaan kegiatan PNPM–MD tahun 2012, lalu dibuat dokumen penyelesaian kegiatan dan dilaporkan ke Kecamatan.

Manfaat adanya kegiatan POSYANDU dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Berikut pendapat dari Ibu Rusmiyati mengenai manfaat POSYANDU yaitu “Menunjang kesehatan lansia dan balita dan juga penunjang gizi dengan adanya PMT”, (wawancara, 24 Januari 2013).

Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rabat beton jalan dan POSYANDU tidak mengurangi keberhasilan dari PNPM-MD di Desa Panggeldlangu. kegiatan PNPM-MD di desa tersebut mendapatkan hasil yang baik dan memiliki kualitas yang baik terutama untuk kegiatan rabat beton jalan. Kegiatan POSYANDU

juga berjalan lancar, dan dapat membantu dalam peningkatan kesehatan balita dan lansia.

Pelaksanaan PNPM-MD tidak terlepas dari kegiatan pengawasan. Tahap pengawasan dalam PNPM-MD merupakan tahap dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan PNPM-MD. Kegiatan PNPM-MD di Desa Panggeldangu diawasi oleh beberapa pihak yaitu dari desa, kecamatan dan masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku utama PNPM-MD harus mengetahui mengenai transparansi baik dalam pelaksanaan maupun penggunaan dana PNPM-MD. Pertanggungjawaban dari kegiatan PNPM-MD secara terbuka yang dihadiri oleh masyarakat merupakan bukti dari transparansi dalam penggunaan dana PNPM-MD.

Tahap selanjutnya dari PNPM-MD yaitu adanya pelestarian. Kegiatan pelestarian dalam PNPM-MD untuk melestarikan hasil dari pelaksanaan kegiatan PNPM-MD terutama kegiatan fisik, misalnya dalam rabat beton jalan, jalan itu harus tetap dilestarikan atau dirawat agar rabat beton jalan tetap bagus dan tidak mudah rusak tetapi untuk pelestarian jalan belum diadakan pelestarian yang maksimal. Pelestarian hanya dilakukan saat kerja bakti untuk pembersihan jalan, sedangkan untuk perbaikan tidak dilaksanakan terkendala oleh dana. Desa belum memiliki dana yang cukup untuk perbaikan rabat beton jalan.

4. Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi PNPM-MD Di Desa Panggeldlangu

PNPM-MD merupakan program atau kebijakan pemerintah dalam pengembangan desa melalui partisipasi masyarakat sekaligus program untuk menanggulangi kemiskinan. Berbagai tahap dari PNPM-MD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian hasil PNPM-MD diperlukan adanya partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan PNPM-MD dapat dilihat dari kedatangan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) dan Musyawarah Desa Perencanaan (MDP) serta adanya pengajuan pendapat dalam musyawarah tersebut. Menyimpulkan dari wawancara yang dilakukan peneliti, masyarakat kebanyakan tidak mengikuti dalam sosialisasi maupun musyawarah perencananaan PNPM-MD sehingga banyak dari mereka juga tidak mengetahui tentang PNPM-MD. Perencanaan PNPM-MD ini menggunakan sistem undangan untuk memberikan informasi kepada masyarakat akan diadakannya sosialisasi PNPM-MD. Undangan untuk kegiatan perencanaan PNPM-MD merupakan perwakilan dari pihak-pihak tinggi desa, selain itu juga terdapat perwakilan dari masyarakat kelompok-kelompok kecil seperti MKP.

Ketiadaan undangan untuk menghadiri perencanan PNPM-MD dari mulai sosialisasi dan musyawarah menjadi kendala dalam masyarakat

untuk berpartisipasi dalam perencanaan PNPM-MD. Berikut pendapat dari Pak Muhammad Sahid yang mengatakan bahwa:

Saya tidak pernah mengikuti sosialisasi PNPM-MD karena tidak pernah mendapat undangan, tetapi saya mengetahui tentang PNPM-MD melihat dari berita di televisi, selain itu saya juga tidak pernah mengikuti musyawarah PNPM-MD karena memang tidak ada undangannya. Bahkan yang mendatangi sosialisasi hanya perwakilan saja. Saya memang tidak mengikuti untuk perencanaan PNPM-MD tetapi untuk pelaksanaannya saya selalu ikut. Pelaksanaan PNPM-MD selalu diinformasikan kepada masyarakat. Pemberitahuan giliran dalam pembuatan rabat beton jalan diberi kabar oleh aparat desa (wawancara, 22 Januari 2013).

Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang PNPM-MD bukan kendala yang dapat menghambat pelaksanaan PNPM-MD. Pada dasarnya pelaksanaan PNPM-MD di Desa Panggeldlangu berjalan baik. Aparat desa menjadi perantara komunikasi kepada masyarakat untuk menginformasikan mengenai pelaksanaan PNPM-MD. Komunikasi ini dilakukan saat pelaksanaan PNPM-MD dengan mendatangi dari rumah ke rumah warga untuk memberitahukan jadwal giliran dalam pelaksanaan PNPM-MD.

a. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembuatan jalan rabat beton

Pembuatan rabat beton pastinya membutuhkan banyak pekerja. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan rabat beton sangat diperlukan. Hasil penelitian melalui wawancara serta observasi dari dokumen PNPM-MD, mendapatkan kesimpulan bahwa dalam pembuatan rabat beton jalan semua warga ikut berpartisipasi, baik laki-laki maupun perempuan.

Bentuk partisipasi masyarakatnya berupa tenaga dan konsumsi. Bagi laki-laki, mereka ikut bekerja dalam pembuatan rabat beton dengan turun langsung ke lapangan dengan membuat cor-cor (adukan material) maupun pengukuran ketepatan jalan, sedangkan bagi kaum perempuan keikutsertaannya dalam pembuatan rabat beton jalan yaitu dengan menyiapkan konsumsi., setiap KK digilir secara merata untuk mengirimkan konsumsi kepada pekerja. Keikutsertaan dari pihak laki-laki juga diadakan secara bergilir karena jika tidak secara digilir maka hanya akan menghambat keefisienan penggunaan tenaga pekerja. Begitu pula dari pihak wanita juga secara bergilir dalam mengirimkan konsumsi untuk kegiatan rabat beton jalan. Mengutip dari hasil wawancara kepada Pak Romadhon menyatakan bahwa :

Pembuatan rabat beton jalan bagi kaum laki-laki diadakan secara bergilir sekitar 5-8 orang per hari. Diadakan secara bergilir karena untuk mengefisienkan penggunaan tenaga. Jika tidak secara digilir maka akan banyak warga yang datang hanya menganggur. Pembuatan rabat beton jalan memerlukan ketelitian yang jeli agar tetap menjaga kualitas sehingga pekerja dalam satu hari tidak perlu banyak tapi bisa tetap ikut berpartisipasi semua makanya digilir per KK. Begitu pula dalam pembawaan konsumsi juga digilir agar makanan yang dikirim tidak mubazir/membuang-buang makanan (wawancara, 24 Januari 2013).

Pembuatan rabat beton jalan secara bergilir, ternyata tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Menyimpulkan dari hasil wawancara bahwa kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi pembuatan rabat beton

sangat tinggi. Seperti yang peneliti kutip dengan wawancara kepada Bapak Kowangit yang menyatakan bahwa:

Semua masyarakat disini sangat berantusias dalam pembuatan rabat beton jalan. Dengan bergotongroyong menyumbangkan tenaga dan konsumsi dapat terlihat bahwa kesadaran masyarakatnya sangat tinggi. Tenaga dan konsumsi per KK merupakan bentuk swadaya dari masyarakat (wawancara, 22 Januari 2013).

Ketidaktahuan warga mengenai PNPM-MD tidak menjadi kendala untuk mereka ikut serta dalam pembuatan rabat beton jalan. Pemberitahuan akan datangnya giliran setiap KK, diberitakan oleh aparat desa dengan mendatangi ke rumah warga. Dalam hal ini aparat pemerintah mempunyai peran sebagai distributor maupun penyalur informasi kepada masyarakat.

Desa merupakan satu wilayah daerah yang memiliki beranekaragam mata pencaharian masyarakatnya. Desa Panggeldlangu merupakan desa yang masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai petani, sehingga dalam pembuatan rabat beton bisa berpartisipasi penuh karena banyak waktu luangnya. Pelaksanaan pembuatan rabat beton jalan pada dasarnya dilaksanakan disaat musim menunggu panen. Bagi pegawai/PNS yang tidak memiliki banyak waktu untuk ikut serta kegiatan di desanya diberikan giliran pada hari libur/hari minggu sehingga mereka tetap dapat ikut berpartisipasi. Bagi kaum janda yang notabennya tidak memiliki suami, mereka mewakilkan dengan membayar tukang atau dengan

mengirim perwakilannya. Mengutip dari wawancara dengan Pak Muh.

Kowangit yang menyatakan bahwa :

Masyarakat sangat antusias dalam pembuatan rabat beton jalan, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki ikutserta dalam pembuatannya sedangkan perempuan dengan menyiapkan makanan. Jika janda, mereka mengirimkan tukang dengan membayar orang, kalau tidak ya biasanya dengan mewakilkan perwakilannya (23 Januari 2013).

Kesadaran masyarakat yang tinggi menjadi modal penting dalam pembuatan rabat beton jalan. Jika masyarakat tidak ikutserta pastinya pelaksanaannya akan terhambat. Disisi lain dari keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan rabat beton jalan, masyarakat sekaligus sebagai pengawas dalam kegiatan pembuatan rabat beton jalan.

Dari hasil wawancara, mengutip dari pendapat Pak Udin yang mengatakan bahwa :

Setiap harinya dalam pembuatan rabat beton tidak hanya untuk ikut serta dalam pembuatan rabat beton jalan, tetapi juga untuk mengawasi pembuatannya. Pengawasnya berupa pengawasan dalam waktu kerja pembuatan rabat beton, pengawasan penggunaan material, dan pengawasan tukang/operator dalam kegiatan tersebut (wawancara, 26 Januari 2013).

Masyarakat tidak hanya berpartisipasi dalam pembuatan rabat beton saja tetapi partisipasi masyarakat juga ikut mengawasi jalannya pembuatan rabat beton jalan. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan rabat beton jalan sangat baik. Masyarakat cukup antusias untuk ikutserta dalam kegiatan tersebut. Kegiatan pembuatan rabat beton jalan dijalankan

secara gotongroyong tanpa ada pemberian gaji kepada masyarakat. Terdapat tukang yang diberikan gaji, tetapi itu memang hanya tukang yang memegang alat-alat berat seperti tukang yang memegang molen. Berikut kutipan pendapat dari Ibu khasanah yang menyatakan bahwa :

Waktu pembuatan jalan rabat beton dilaksanakan dengan gotongroyong jadi tidak mengharap bayaran, warga juga sadar akan keaktifan untuk ikutserta dalam pembuatan rabat beton jalan. Bagi kaum ibu dalam menyiapkan konsumsi juga dengan sukarela. Memang ada yang dibayar pekerja dalam pembuatan rabat beton jalan tetapi itu hanya tukang-tukang tertentu yang memegang alat-alat berat saja, kan kasihan juga kulan nggak dibayar karena kerjanya berat (wawancara, 9 Februari 2013).

Keikutsertaan dalam pelaksanaan PNPM-MD tidak hanya masyarakat saja tetapi juga dari aparat pemerintahannya. Aparat desa merupakan bagian dari masyarakat juga sehingga aparat desa juga ikut serta dalam pembuatan rabat beton khususnya dan ikut serta juga dalam PNPM-MD pada umumnya. Kepala desa merupakan pihak yang bertanggungjawab akan kesejahteraan masyarakat dan desanya. Kepala desa memiliki peran penting yaitu sebagai penanggungjawab PNPM-MD di desanya, selain itu juga tanpa adanya persetujuan dari kepala desa maka tidak akan dapat mengikuti PNPM-MD. Usulan pengajuan PNPM-MD harus ada persetujuan dari kepala desa Panggeldlangu dan dalam pelaksanaannya, kepala desa juga ikut berpartisipasi serta mengawasi jalannya pembuatan rabat beton.

Aparat desa juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan PNPM-MD. Disini, perangkat desa bertugas menyalurkan informasi kepada masyarakat ketika akan diadakan sosialisasi, musyawarah dan pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian PNPM-MD. Pelaksanaan rabat beton yang secara bergilir merupakan menjadi tugas untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang jadwal bergilirnya. Jadi, dalam pelaksanaan PNPM-MD tidak hanya masyarakat yang berpartisipasi tetapi juga dari aparat pemerintahan desa. Cara tersebut merupakan salah satu cara untuk mengkoordinasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM-MD.

PNPM-MD merupakan program yang memiliki prinsip dasar transparansi. Penggunaan dana dari PNPM-MD harus benar-benar transparan dan masyarakat mengetahui untuk penggunaan dana tersebut. Pembuatan rabat beton jalan di Desa Panggeldlangu bersifat transparan dalam penggunaan dananya. Pertanggungjawaban penggunaan dana juga disaksikan oleh masyarakat bahkan ditempel di papan pengumuman di balai desa Panggeldlangu.

Pertanggungjawaban penggunaan dana dalam pembuatan rabat beton jalan dilaporkan saat pelaksanaan telah mencapai 40%, setelah itu pelaksanaan 80% dan yang terakhir dalam pelaksanaan 100%. Laporan pertanggungjawaban ini harus diketahui kepala desa dan nantinya akan diserahkan kepada pihak Kecamatan.

Pelaksanaan PNPM-MD di Desa Panggeldlangu tahun 2012, pada pembuatan rabat beton jalan tidak ada kendala yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat. Masyarakat berantusias dan memiliki kesadaran yang tinggi untuk ikut serta dalam pembuatan rabat beton jalan. Masyarakat juga merasa memiliki tanggungjawab atas terlaksananya jalan rabat beton jalan, selain dari itu adanya kemanfaatan yang dirasakan masyarakat akan adanya pembuatan rabat beton juga memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan rabat beton jalan. Berikut pendapat dari masyarakat dengan mengutip dari wawancara dengan Bapak Sumarmo yang menyatakan bahwa :

Meskipun saya tidak mengikuti sosialisasi PNPM-MD, tetapi saya juga tahu kalau pembuatan rabat beton jalan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama ya akan saya rasakan sendiri. Jalan akan menjadi bagus dan tidak *becek* lagi kalau hujan. Masyarakat disini sifat kegotongroyongannya masih tinggi, jadi untuk kesadaran bekerja bekerja guna memperbaiki jalan juga sangat tinggi (wawancara, 23 Januari 2013).

Kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat akan adanya rabat beton jalan yaitu transportasi menjadi lancar. Desa Panggeldlangu yang dahulunya memiliki jalan desa yang masih berupa tanah biasa, rusak dan *becek* saat musim hujan, dengan adanya pendanaan dari PNPM-MD untuk pembuatan rabat beton jalan menjadikan jalan desa menjadi bagus dan mudah dilewati. Hal ini juga dapat disimpulkan bahwa adanya pembuatan rabat beton sudah tepat sasaran yang bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan POSYANDU

Kegiatan POSYANDU merupakan kegiatan yang diadakan guna meningkatkan kesehatan bagi kaum balita dan lansia. Partisipasi masyarakat dalam PNPM-MD akan terlihat dari keikutsertaan balita maupun lansia dalam kegiatannya, selain itu juga dapat dilihat dari adanya kaderisasi dalam kegiatan tersebut.

1) POSYANDU balita

Desa Panggeldangu memiliki tiga kelompok POSYANDU yang terbagi dalam setiap Rukun Warga (RW). Setiap RW memiliki kelompok POSYANDU sendiri-sendiri. Terdapat sekitar 55 balita dalam satu desa yang menerima manfaat kegiatan POSYANDU. Balita banyak yang ikut dalam kegiatan tersebut bahkan kesadaran seorang ibu untuk membawa anaknya ke POSYANDU cukup berantusias. Sekitar 80% persen dari jumlah secara keseluruhan balita datang setiap pelaksanaan POSYANDU. Hal ini sudah memenuhi target seperti yang diharapkan. Seperti kutipan yang dinyatakan oleh Ibu Yuni yang menyatakan bahwa : “kedatangan balita dalam setiap pelaksanaan sekitar 80% dari jumlah balitanya. Jumlah tersebut sudah memenuhi target yang diharapkan, sisanya 20 % merupakan balita yang tidak datang (wawancara, 25 Januari 2013).

Partisipasi balita dalam mengikuti kegiatan POSYANDU cukup antusias tetapi tidak sedikit yang tidak berangkat. Terkadang

hanya orang itu-itu saja yang mendatangi kegiatan POSYANDU. Hal ini menjadi kendala atas pelaksanaan POSYANDU. Kurangnya kesadaran ibu untuk mengikuti POSYANDU menyebabkan tidak adanya inisiatif untuk membawa balitanya untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Kemanfaatan akan adanya POSYANDU pastinya dapat dirasakan oleh balita yang mengikuti kegiatan tersebut. POSYANDU yang pada dasarnya untuk mengontrol kesehatan balita dapat memberikan manfaat yang besar bagi balita. Penimbangan guna mengetahui perkembangan berat badan balita, pemberian vitamin guna meningkatkan kekebalan tubuh terutama vitamin A agar menjaga kesehatan mata balita. Adanya Alat Peraga Edukasi (APE) digunakan untuk memperkenalkan alat bermain kepada balita. Kemanfaatan yang dirasakan masyarakat akan adanya POSYANDU merupakan gambaran akan tepatnya sasaran yang menjadi target kegiatan tersebut.

2) POSYANDU lansia

Pada dasarnya POSYANDU lansia dengan POSYANDU balita memiliki kesamaan target yaitu untuk peningkatan kesehatan. Dalam POSYANDU lansia diikuti oleh warga yang berumur diatas 60 tahun, tetapi jika belum ada 60 tahun ingin mengikuti kegiatan tersebut

diperbolehkan. Berikut kutipan dari wawancara dengan Ibu Khasanah yang menyatakan bahwa :

Rata-rata yang mengikuti kegiatan lansia merupakan warga yang sudah berumur 60 tahun keatas, tetapi saya sendiri masih berumur 52 tahun juga boleh ikut. Saya berfikir daripada saya dirumah lebih baik ikut kegiatan POSYANDU lansia dapat mengontrol kesehatan, dapat susu anlene serta ada pengajiannya juga (wawancara, 23 Januari 2013).

Lansia yang mengikuti POSYANDU kebanyakan kaum perempuan, sedangkan kaum laki-laki hanya sedikit sekali. Masyarakat yang mengikuti kegiatan ini sekitar 30 orang. Berikut pendapat Ibu Khasanah yang menyatakan bahwa :

Kalau laki-laki yang terlihat hanya dua sampai empat orang saja yang ikut POSYANDU, padahal sebenarnya POSYANDU lansia baik laki-laki maupun perempuan boleh ikut tanpa pembedaan tetapi kalau laki-laki hanya sedikit sekali. Kesadaran kaum laki-laki dalam mengikuti kegiatan POSYANDU sangat kurang. Padahalkan adanya POSYANDU lansia sangat bermanfaat (wawancara, 23 Januari 2013).

Melihat dari pernyataan tersebut, kesadaran dari kaum perempuan lebih tinggi dibandingkan kaum laki-laki, padahal dalam pelaksanaan POSYANDU lansia tidak ada perbedaan gender. Baik kaum laki-laki maupun perempuan boleh ikut berpartisipasi dalam kegiatan POSYANDU.

POSYANDU lansia dilaksanakan setiap satu bula sekali yang diadakan setiap sabtu terakhir setiap bulannya. Bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini yaitu mendatangi kegiatan

POSYANDU, sedangkan bentuk swadayanya terdapat dari kader POSYANDU. Kader POSYANDU bertugas untuk membantu dalam penimbangan, mengurus administrasi serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan POSYANDU lansia menjadi kendala dalam pelaksanaan PNPM-MD bidang kesehatan ini, selain itu juga kurangnya kesadaran masyarakat yang ingin menjadi kader POSYANDU sangat kurang.

Salah satu cara mengkoordinasi masyarakat dalam kegiatan POSYANDU yaitu dalam memberikan sosialisasi/penyuluhan kesehatan. Adanya penyuluhan tersebut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya meningkatkan kesehatan serta memberikan pengetahuan tentang kesehatan seperti tentang penyakit-penyakit yang rawan terjangkit bagi kaum lansia, selain itu juga dapat memberikan informasi mengenai kemanfaatan adanya POSYANDU bagi lansia. Berikut manfaat adanya kegiatan POSYANDU yang dikutip dari pendapat Ibu Rusmiyati (52 tahun), “adanya kegiatan POSYANDU sebenarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat, misalnya saja dapat menunjang kesehatan lansia, selain itu juga sebagai penunjang gizi karena diberi makanan tambahan” (wawancara, 9 Februari 2013).

Secara umum baik POSYANDU balita maupun lansia merupakan program yang memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat. Hanya saja terdapat kendala yang akan menyebabkan pelaksanaan POSYANDU kurang berjalan maksimal yaitu dari masyarakatnya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Khasanah “menurut saya, POSYANDU lansia sudah berjalan baik, memiliki manfaat yang besar tetapi yang menjadi kendalanya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan POSYANDU” (wawancara, 23 Januari 2013).

Menurut Ibu Yuni yang menjadi kendala dalam kegiatan POSYANDU secara umum baik POSYANDU lansia dan balita yaitu :

“Kendala yang terjadi dalam kegiatan POSYANDU seperti dalam pemilihan kader sangat sulit, karena kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut kaderisasi sehingga kader banyak diambil dari istri perangkat, banyak balita maupun lansia yang tidak hadir, selain itu juga karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya POSYANDU” (wawancara, 25 Januari 2013).

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan POSYANDU sebenarnya tidak hanya untuk ikut serta tetapi juga sebagai pengawas kegiatan. Disini masyarakat dapat mengawasi secara langsung kinerja kader POSYANDU serta Bidan Desanya. Penggunaan pendanaan POSYANDU bersifat transparan. Setiap bulannya dibuat perekapan dana penggunaan dana untuk kegiatan POSYANDU lalu perekapan

dana tersebut akan dilaporkan ke Kepala Desa untuk diperiksa dan sebagai laporan pertanggungjawaban dari kegiatan tersebut.

Hasil deskripsi penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam implementasi PNPM-MD di Desa Panggeldlangu sudah baik namun terdapat beberapa permasalahan yang sekiranya masih menjadi kendala atas kurangnya partisipasi masyarakat dalam PNPM-MD. Pendalaman materi mengenai partisipasi masyarakat dalam implementasi PNPM-MD Di desa Panggeldlangu, maka peneliti akan mendeskripsikan lebih rinci dengan berdasarkan indikator dari implementasi kebijakan menurut Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III dengan menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

a) Komunikasi

Bentuk komunikasi dalam kegiatan PNPM-MD melalui sosialisasi dan musyawarah. Tahap perencanaan dari PNPM-MD diperlukan adanya sosialisasi dan musyawarah dengan masyarakat untuk mendapatkan usulan kegiatan. Sosialisasi PNPM-MD diadakan untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat bahwa seyogyanya dalam PNPM-MD merupakan program/kebijakan pemerintah yang mengandalkan secara penuh adanya partisipasi masyarakat. Sosialisasi ini didatangi oleh beberapa perwakilan orang

saja, sehingga dalam sosialisasi tersebut hanya sedikit masyarakat yang berpartisipasi. Pemberian sosialisasi PNPM-MD tidak hanya dari Tim Pengelola PNPM-MD desa saja melainkan juga dari pihak kecamatan.

Komunikasi lain dalam PNPM-MD yaitu adanya musyawarah. Musyawarah ini merupakan musyawarah dalam tahap perencanaan usulan serta musyawarah laporan pertanggungjawaban PNPM-MD. Musyawarah ini terdapat beberapa macam yaitu MKP dan MDP. MKP didatangi oleh perempuan yang akan menghasilkan dua usulan untuk PNPM-MD, sedangkan MDP untuk memusyawarahkan hasil usulan dari MKP dan usulan desa. Musyawarah MKP dan MDP juga ditemukan kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengikutinya.

Sosialisasi dan musyawarah tidak akan berjalan tanpa adanya media yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Undangan merupakan media yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat akan diadakannya sosialisais dan musyawarah tersebut. Pada tahap perencanaan, media undangan kurang efektif karena tidak semua warga masyaraat mendapatkan undangan untuk kegiatan sosialisasi dan musyawarah PNPM-MD melainkan hanya perwakilan dari tokoh masyarakat saja.

Komunikasi antar pelaku PNPM-MD juga penting dalam pelaksanaan PNPM-MD yaitu sebagai alat untuk mengkoordinasi

masyarakat. Pengkoordinasian ini terutama dilakukan oleh aparat pemerintahan desa untuk memberitahukan pelaksanaan PNPM-MD. Contoh pengkoordinasian kepada masyarakat yaitu perangkat desa menjadwalkan giliran warga dalam pelaksanaan pembuatan rabat beton dan giliran bagi warga yang membawa konsumsi. Pengkoordinasian giliran berasal dari musyawarah Tim Pengelola dan aparat desa.

b) Sumber daya

Sumber daya dalam PNPM-MD terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya manusianya yaitu masyarakat yang menjadi sasaran PNPM-MD. Sebagai pelaku utama PNPM-MD masyarakat menjadi modal utama dalam pelaksanaan PNPM-MD di Desa Panggeldlangu. Keberagaman pekerjaan maupun kepentingan masyarakat tidak menjadi halangan untuk ikut serta dalam PNPM-MD. Masyarakat yang berpartisipasi tidak hanya laki-laki saja tetapi juga perempuan. Baik aparat pemerintahan, janda dan masyarakat dari semua kalangan sangat berantusias dalam pelaksanaan PNPM-MD.

Bentuk sumber sumber daya manusianya yaitu keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan tersebut serta adanya bentuk keswadayaan masyarakat. Kualitas dari sumber daya manusia di Desa Panggeldlangu cukup terbatas terutama untuk tahap perencanaan

PNPM-MD. Tahap perencanaan PNPM-mD terutama untuk pembuatan proposal diperlukan adanya SDM manusia yang memiliki pengetahuan dan informasi yang luas tentang PNPM-MD, tetapi untuk masyarakat Desa Panggeldangu masih sangat terbatas. Pada dasarnya pembuatan proposal PNPM-MD masih dilakukan oleh KPMD, sedangkan dalam pelaksanaan PNPM-MD masyarakat dapat terlibat secara penuh baik laki-laki maupun perempuan.

Berbagai tahap PNPM-MD membutuhkan keterlibatan masyarakat didalamnya, tetapi belum sepenuhnya masyarakat dapat berpartisipasi secara penuh, seperti dalam tahap perencanaan, sedangkan untuk pelaksanaan, pengawasan kegiatan PNPM-MD masyarakat telah berantusias secara penuh meskipun masih ditemukan kurangnya kesadaran masyarakat mengikuti kegiatan POSYANDU dan menjadi kadernya.

Sumber daya finansial dari masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat yaitu swadaya dari masyarakat yang berupa tenaga, konsumsi, dan pikiran. Swadaya masyarakat merupakan bentuk kegotongroyongan masyarakat dalam pelaksanaan PNPM-MD. Laki-laki menyumbangkan tenaga, konsumsi oleh perempuan sedangkan pikiran bagi Tim pengelola PNPM-MD yang bekerja ekstra dalam pengadaan usulan serta pembuatan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan PNPM-MD.

Sumber finansial juga berasal dari bantuan dana dari donatur perantauan dan dari desa. Adanya sumber daya yang mendukung dalam pelaksanaan PNPM-MD menjadi modal yang utama. Sumber daya ini merupakan sebagai gambaran bahwa adanya pelaksanaan PNPM-MD sudah tepat sasaran terutama adanya antusiasme masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan PNPM-MD. Dengan motivasi kegotongroyongan yang tinggi, tanpa digaji pun masyarakat tetap ikut serta dalam pelaksanaan PNPM-MD. Meskipun ada beberapa tukang yang digaji tetapi itu karena mereka mengurus dalam alat berat pembuatan jalan rabat beton, sedangkan masyarakat secara umum bekerja dengan gotongroyong.

c) Disposisi

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM-MD memiliki komitmen yang tinggi sehingga dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan PNPM-MD di Desa Panggeldlangu juga sesuai dengan ketentuan dari Kecamatan. Keuletan masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan PNPM-MD secara gotongroyong memperlancar penyelesaian kegiatan PNPM-MD terutama dalam pembuatan rabat beton jalan, tetapi masih ditemukan pula adanya kurangnya kesadaran masyarakat ikut serta dalam PNPM-MD misalnya seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti kegiatan POSYANDU serta kurangnya kesadaran masyarakat menjadi kader

POSYANDU. Hal tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan PNPM-MD dalam bidang kesehatan.

Pelaksanaan PNPM-MD juga terdapat kejujuran dari pelaku PNPM-MD, baik dari masyarakat maupun struktur birokrasinya. Kejujuran ini terlihat adanya transparansi laporan pertanggungjawaban yang bisa ditunjukkan kepada masyarakat, selain itu juga ada pengawasan dari masyarakat dalam pelaksanaan PNPM-MD di Desa Panggeldlangu. Adanya pengawasan dari masyarakat akan menjadi penerapan dari prinsip PNPM-MD sehingga dengan hal tersebut dapat terlihat dari adanya kesesuaian dengan ketentuan dari PNPM-MD bahwa masyarakat akan terlibat secara penuh dalam PNPM-MD.

Penerapan karakter implementor secara demokrasi juga terlihat dari adanya pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian. Adanya penerapan karakter implementor dari komitmen, kejujuran dan demokrasi merupakan bentuk nyata adanya ketepatan pelaksanaan PNPM-MD sesuai dengan prinsip PNPM-MD.

d) Struktur Birokrasi

PNPM-MD merupakan sebuah program atas kerja sama dari beberapa departemen pemerintah. PNPM-MD terkait dengan kerja

sama antar dinas antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan sebagainya. Tim Pengendali PNPM provinsi menunjuk Departemen Pekerjaan Umum sebagai penanggungjawab pengelolaan PNPM-MD tingkat nasional. Koordinasi antar masing-masing Dinas Pemerintah dikoordinasikan agar tugas masing-masing dinas tidak saling berbenturan.

Setiap tingkatan pemerintahan dari provinsi, kabupaten, kecamatan maupun kelurahan memiliki struktur birokrasi sebagai pengelola PNPM-MD. Tingkat nasional penanggungjawabnya DPU, Provinsi ada Gubernur, Kabupaten ada Bupati/Walikota melalui Bappeda, Kecamatan terdapat Camat sedangkan dari kelurahan terdapat Lurah.

Birokrasi di kelurahan yang menangani PNPM-MD berasal berdasarkan adanya musyawarah dari masyarakat dalam musyawarah perencanaan PNPM-MD. Dalam musyawarah tersebut menunjuk beberapa orang untuk pengorganisasian PNPM-MD yaitu sebagai KPMD, TPK, sekretaris PNPM-MD, bendahara PNPM-MD, TPU, dan Tim pelestarian. Berikut ini merupakan struktur organisasi pelaku PNPM-MD Desa Panggeldlangu tahun 2012 :

Tabel 4. Struktur Organisasi PNPM_MD Desa Panggeldlangu tahun 2012

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Masngudi

2	KPMD	Riyatno
3	KPMD	Muh. Kowangit
4	KPMD	Siti Saechah
5	TPK	Slamet
6	Sekretaris TPK	Saiful Lukman
7	Bendhara TPK	R.R Endang S. Diganti oleh Juniati

(Sumber : Dokumen Penyelesaian PNPM-MD Desa Panggeldlangu tahun 2012).

Struktur Organisasi dalam PNPM-MD terbentuk atas partisipasi masyarakat mereka memiliki tugas yang berbeda-beda. Meskipun secara pengorganisasian terdapat tingkatan tertentu tetapi semua hasil dari PNPM-MD baik dari perencanaan dan pelaksanaan yaitu berdasarkan musyawarah dengan masyarakat secara umum. Masyarakat merupakan sasaran utama dari PNPM-MD sehingga masyarakat juga selaku pelaku utama dalam PNPM-MD.

Kepala desa disini sangat berperan penting dalam pengesahan pengambilan keputusan. Semua keputusan yang diambil dalam PNPM-MD harus ada persetujuan dari Kepala Desa. Selain itu, Kepala Desa juga sebagai penanggungjawab desa atas pelaksanaan PNPM-MD di Desa Panggeldlangu. Dalam laporan pertanggungjawaban atas terlaksananya PNPM-MD di Desa Panggeldlangu selain diketahui oleh masyarakat tetapi yang terpenting yaitu dilaporkan kepada Kepala Desa sebagai penanggungjawab dari Desa.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Kebijakan pemerintah merupakan kebijakan yang dibuat guna mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Kebijakan pemerintah seharusnya dibentuk berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kesesuaian kebijakan pemerintah terhadap keinginan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di kalangan masyarakat. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dibuat untuk kesejahteraan rakyatnya.

Banyaknya permasalahan yang terjadi di Indonesia merupakan kompleksitas dari keadaan masyarakat yang beranekaragam. Kemiskinan merupakan masalah yang sulit diatasi. Perbedaan kemiskinan antara pedesaan dan perkotaan juga sangat terlihat. Pedesaan yang masih jauh dari peradaban masih memiliki banyak warga yang berada pada kalangan menengah ke bawah, bahkan masyarakat miskin masih cukup banyak.

Berbagai kebijakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan pun telah dijalankan namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan optimal. Sebelumnya, dari semua kebijakan penanggulangan kemiskinan hanya memanjakan masyarakat dengan memberikan bantuan secara tunai kepada masyarakat sehingga masyarakat cenderung bertambah malas untuk bekerja. Hingga pada tahun 2007 dibentuklah kebijakan pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD).

PNPM-MD merupakan program penanggulangan kemiskinan dengan memprioritaskan adanya partisipasi masyarakat dalam kebijakan tersebut. PNPM-MD ini dibentuk agar dapat lebih tepat guna bagi masyarakat. PNPM-MD yang memprioritaskan pada partisipasi masyarakat diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Aspirasi masyarakat dapat disalurkan dengan adanya Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) maupun Musyawarah Desa Perencanaan (MDP) dalam tahap perencanaan PNPM-MD.

Masyarakat merupakan sasaran utama baik tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian dalam PNPM-MD. Modal utama PNPM-MD yaitu adanya partisipasi masyarakat didalamnya. Ketetapan sasaran PNPM-MD akan tercapai jika masyarakat dapat berpartisipasi penuh dan adanya PNPM-MD dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Desa Panggeldlangu merupakan salah satu desa yang mendapat bantuan dari dana PNPM-MD pada tahun 2012. Pendanaan dari PNPM-MD bukan didapatkan dengan cuma-cuma tetapi karena adanya proses yang harus dilalui. Beberapa proses tersebut harus sesuai dengan ketentuan dari pihak kecamatan.

Dalam buku materi pembelajaran KPMD, telah digambarkan adanya proses usulan PNPM-MD.

a. Pengamatan secara langsung dilapangan

Pengamatan langsung di lapangan merupakan pengamatan di desa guna menemukan masalah yang perlu ditangani untuk kegiatan PNPM-

MD. Pengamatan atas masalah yang terjadi di Desa Pangeldlangu mendapatkan hasil mengenai perbaikan jalan, perbaikan kesehatan serta siperlukannya bantuan modal untuk usaha masyarakat.

b. Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi

MAD Sosialisasi merupakan tahap untuk pelatihan KPMD dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang PNPM-MD dan memberikan pengertian masyarakat akan usulan yang akan diajukan ke kecamatan. Di Desa Pangeldlangu adanya MAD sosialisasi diadakan guna mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai PNPM-MD. MAD Sosialisasi disini diadakan pada musyawarah desa secara umum serta adanya MKP. MKP diikuti oleh perempuan guna memusyawarahkan usulan gagasan yang perlu diajukan ke PNPM-MD.

c. Penggalian Gagasan

Dalam penggalian gagasan diadakan Musyawarah Desa Khusus Perempuan (Musdes Perempuan) / MKP. Hasil MKP akan diajukan dua jenis kegiatan untuk diusulkan dalam PNPM-MD. Pada saat MKP ini diajukan 2 kegiatan yaitu kegiatan SPP dan kegiatan dalam bidang kesehatan yaitu POSYANDU dan POSLANSIA. Sedangkan dari musdes mendapatkan hasil adanya penetapan usulan tahun 2012 bahwa Desa Pangeldlangu mengajukan 3 usulan yaitu rabat beton jalan, SPP dan pada bidang kesehatan yaitu POSYANDU.

d. Musdes Perencanaan/MDP

Musdes Perencanaan berisi musyawarah untuk menetapkan usulan kegiatan. Hasil dari usulan penggalan gagasan lalu dikemas dalam proposal kemudian diajukan ke Kecamatan untuk diverifikasi/penilaian. Di Desa Panggeldangu usulan PNPM-MD dikerjakan oleh KPMD. Pembuatan usulan diperlukan adanya keahaman penuh dalam PNPM-MD, sehingga harus dapat sesuai dengan ketentuan dari kecamatan.

e. MAD Prioritas Usulan

MAD Prioritas Usulan merupakan musyawarah antar desa dimana forum ini sebagai forum penilaian usulan PNPM-MD dengan disaksikan dari peserta desa yang mengajukan usulan tersebut. Setiap desa diwakilkan oleh 6 orang yang terdiri dari wakil dari TPK, Kepala Desa, Tokoh masyarakat, dan perwakilan dari MKP. Hasil MAD prioritas usulan, pada tahun 2012 Desa Panggeldangu mendapatkan peringkat yang cukup baik.

f. MAD Penetapan

Musyawarah ini akan ditetapkan desa mana saja yang akan mendapat dana dari PNPM-MD. Setelah MAD Prioritas Usulan sudah ditetapkan peringkat usulan antar desanya lalu ditentukan desa mana saja yang akan mendapat pendanaan untuk usulan PNPM-MD. Usulan yang telah diserahkan oleh ke kecamatan diperingkat dan peringkat paling atas akan mendapatkan dana tersebut. Akhirnya dari penetapan MAD, Desa

Pangeldlangu mendapatkan pendanaan untuk rabat beton jalan serta ada POSYANDU.

Proses PNPM-MD merupakan contoh proses perumusan kebijakan, dalam perumusan kebijakan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga dapat tepat sasaran. Setelah adanya perumusan kebijakan lalu dilanjutkan dengan implementasi kebijakan. Pendanaan yang diterima Desa Pangeldlangu dari PNPM-MD akhirnya dilaksanakanlah pembuatan rabat beton jalan serta kegiatan POSYANDU. Melihat dari pembahasan diatas, bahwa proses PNPM-MD yang dijalankan oleh Desa Pangeldlangu telah sesuai dengan ketentuan dari Kecamatan.

Yeremias (2004:62) menyatakan “Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi tadi dilaksanakan oleh unit-unit tertentu dengan memobilisasikan dana dan sumber daya yang ada. Pada tahap ini, proses monitoring dilakukan”. Penerapan dari penerimaan PNPM-MD Desa Pangeldlangu lalu dilaksanakan PNPM-MD dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi. Pelaksanaannya dijalankan sesuai dana dari PNPM-MD tetapi dalam pelaksanaannya ternyata ada penambahan panjang jalan rabat beton sehingga untuk kekurangan dana ditambah dari desa. Masyarakat menjadi sumber daya utama atas terlaksananya PNPM-MD, sebagai pelaku utama PNPM-MD masyarakat juga mempunyai hak untuk pengawasan atas pelaksanaan PNPM-MD.

Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan, sangat antusias untuk mengikuti. Bahkan dari semua kalangan tanpa memandang jabatan, pekerjaan maupun status sosial semua masyarakat ikut berpartisipasi. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM-MD dapat dilihat dari tahapan partisipasinya.

Mengacu dari pendapat dari Tjokroaminoto membagi partisipasi menjadi tiga tahapan, yaitu :

1. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Keterlibatan masyarakat pada tahap ini dapat terlihat dari perencanaan PNPM-MD saat diadakan musyawarah untuk pengajuan usulan desa. Masyarakat merupakan pelaku utama dalam PNPM-MD sehingga dalam penentuan usulan juga harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Musyawarah yang dilakukan juga tidak memandang adanya perbedaan gender. Pengajuan usulan lebih difokuskan pada MKP atau musyawarah perempuan karena pada dasarnya PNPM-MD ingin meningkatkan keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan usulan. MKP mengusulkan dua kegiatan lalu dimusyawarahkan lagi dalam musdes beserta usulan dari desa yaitu penetapan 3 usulan untuk pengajuan PNPM-MD.

2. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Pelaksanaan PNPM-MD di Desa Panggeldangu tahun 2012 berjalan dengan baik, bahkan pelaksanaan rabat beton mendapatkan apresiasi dari pihak kabupaten untuk kegiatan rabat beton jalan. Keikutsertaan masyarakat dalam memikul beban dalam pelaksanaan menjadi modal yang sangat penting. Kesadaran masyarakat dalam mengikuti pembuatan rabat beton sangat tinggi. Dalam pelaksanaannya pun tidak hanya laki-laki saja yang ikut berpartisipasi tetapi juga dari pihak perempuan.

Mengutip dari pendapat Ndraha (dalam Nyoman Sumaryadi, 2010:55) mengemukakan bahwa partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan meliputi :

- a. Mengarahkan daya dan dana
- b. Administrasi dan koordinasi
- c. Penjabaran ke dalam program.

Penerapan teori tersebut dilaksanakan dalam PNPM-MD. Disini masyarakat menggunakan dana dengan penyesuaian dana dari PNPM-MD, sedangkan dalam bentuk daya ditunjukkan dengan adanya swadaya dari masyarakat dalam bentuk tenaga, konsumsi dan pikiran. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut diadakan dengan swadaya tanpa adanya pemberian gaji pada masyarakat kecuali tukang yang memegang alat berat.

Pengurusan administrasi dan koordinasi dalam pelaksanaan PNPM-MD menjadi tugas dari TPK serta KPMD. Koordinasi masyarakat yang dilakukan oleh KPMD yaitu melalui sosialisasi dan musyawarah PNPM-MD terutama saat pengajuan usulan. Koordinasi dalam pelaksanaan PNPM-MD yaitu tugas dari perangkat desa. Misalnya dalam pembuatan rabat beton jalan, perangkat desa akan mengatur jadwal giliran masyarakat yang berpartisipasi setiap harinya.

Setelah itu, pemberitahuan informasinya dengan mendatangi ke rumah masyarakat. tidak hanya dalam pembuatan rabat beton jalan tetapa dalam kegiatan POYANDU juga diadakan sosialisasi yang berupa penyuluhan kepada balita dan lansia. Penyuluhan ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mengikuti POSYANDU.

Penjabaran ke dalam program yaitu berbagai tahap diatas dijabarkan dalam pelaksanaan PNPM-MD. Semua tahapan tersebut diproses dalam laporan pertanggungjawaban atas terlaksananya PNPM-MD. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM-MD juga terlihat dalam pengawasan pelaksanaan. Laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat akan ditransparansikan kepada masyarakat sehingga masyarakat.

3. Keterlibatan dalam memetik dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

Kebijakan pemerintah tentunya bertujuan demi kesejahteraan masyarakatnya, begitu pula dengan adanya PNPM-MD. PNPM-MD merupakan program untuk penanggulangan kemiskinan tetapi juga sebagai program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam PNPM-MD akan terlihat dari adanya partisipasi masyarakat dalam tahap-tahap PNPM-MD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian.

PNPM-MD dimusyawarahkan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat sehingga kemanfaatannya pun akan dirasakan oleh masyarakat. PNPM-MD di Desa Panggeldlangu memiliki dua kegiatan yaitu pembuatan rabat beton jalan dan POSYANDU. Tentunya masing-masing program tersebut memiliki manfaat yang berbeda pula.

Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya pembuatan rabat beton jalan antara lain :

- 1) Transportasi menjadi lancar
- 2) Tidak *becek* lagi jika musim hujan

Manfaat untuk kegiatan POSYANDU antara lain :

- 1) Menunjang kesehatan bagi lansia dan balita
- 2) Menunjang gizi bagi lansia dan balita dengan adanya penambahan makanan tambahan.
- 3) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan.

Partisipasi Masyarakat dalam kebijakan pemerintah merupakan kesediaan masyarakat untuk ikut serta dalam kebijakan tersebut. Adanya partisipasi masyarakat dapat mendorong munculnya kemandirian dalam diri masyarakat. Masyarakat dapat merasakan keberhasilan program tersebut setelah mereka mampu merasakan sulitnya dalam pelaksanaannya. Adanya usaha untuk bisa menyelesaikan sebuah kebijakan demi kemanfaatan yang akan dirasakan sendiri untuk masyarakat.

Partisipasi masyarakat menjadi modal penting dalam kebijakan yang memprioritaskan pemberdayaan masyarakat. Tanpa adanya peran serta masyarakat maka keberhasilan dari program tersebut tidak akan tercapai. Usaha dari pemerintah dalam pembuatan berbagai kebijakan jika tidak melibatkan partisipasi masyarakat akan mendapatkan hasil yang berbeda dengan adanya masyarakat yang berpartisipasi. partisipasi masyarakat merupakan kemandirian yang tercipta dapat sekaligus mengembangkan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat lebih berdaya guna.

Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan PNPM-MD akan memberikan gambaran bahwa masyarakat memiliki antusias yang tinggi dalam berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah. Penelitian ini melihat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM-MD dengan mengacu pada model implementasi kebijakan George C. Edward dengan menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi.

Keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM-MD tahun 2012 akan terlihat dari penerapan teori ini.

- 1) Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.

Komunikasi berperan penting dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat. Tanpa adanya komunikasi antar pelaku PNPM-MD maka pelaksanaannya juga tidak akan berjalan dengan baik. Sosialisasi dan musyawarah merupakan cara menyambung komunikasi antar pelaku PNPM-MD dalam tahap perencanaan. Kendala dalam sosialisasi PNPM-MD yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta sosialisasi yang diadakan di Desa Panggeldlangu. Masyarakat yang ikut hanya orang-orang tertentu sebagai perwakilan. Perencanaan PNPM-MD kurang menerapkan komunikasi dengan masyarakat seutuhnya.

Komunikasi dalam pelaksanaan PNPM-MD seperti kegiatan pemberian jadwal gilir untuk masyarakat dalam ikut serta pelaksanaan PNPM-MD di Desa panggeldlangu yang melalui perantara aparat desa. Sebenarnya komunikasi dalam pengkoordinasian masyarakat dalam pelaksanaan PNPM-MD Desa Panggeldlangu sudah baik tetapi

kendalanya yaitu saat perencanaan PNPM-MD sehingga hanya sedikit masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam sosialisasi PNPM-MD.

- 2) Sumber daya, yaitu menunjuk sikap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah.

Pelaksanaan PNPM-MD Desa Panggeldlangu telah terdapat sumber daya yang mencakup sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM-MD merupakan gambaran nyata bahwa sumber daya manusia di desa tersebut cukup memadai. Semua kalangan masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan PNPM-MD tanpa terkecuali.

Permasalahan dalam sumber daya manusia yaitu kurangnya SDM yang berkualitas dalam perencanaan PNPM-MD terutama dalam pembuatan usulan. Permasalahan dalam pelaksanaan PNPM-MD, kendala mengenai sumber daya manusia yaitu pada pelaksanaan POSYANDU, kendalanya yaitu :

- a) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengikuti kegiatan POSYANDU yaitu terlihat dari masih ada balita dan lansia yang jarang berangkat POSYANDU.
- b) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi kader POSYANDU, sehingga dalam pemilihan kader hanya berasal dari istri perangkat desa.

Kegiatan rabat beton jalan kendala pelaksanaannya tidak berasal sumber daya manusianya melainkan berdasarkan infrastruktur desanya. Sumber daya finansial yaitu berasal dari masyarakat. Bantuan dana dari PNPM-MD mejadi modal dana untuk pelaksanaan pembangunan tetapi sumber daya dari masyarakatnya yaitu adanya swadaya masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan PNPM-MD. Bentuk swadaya masyarakatnya yaitu :

- a) Tenaga

Tenaga dari masyarakat merupakan bentuk dari partisipasi masyarakat. dengan berasaskan gotongroyong masyarakat ikut berkerja dalam pelaksanaan PNPM-MD. Bentuk swadaya tenaga dari kaum laki-laki dalam pembuatan rabat beton jalan sedangkan dari kaum perempuan yaitu pada kegiatan POSYANDU yang bekerja menjadi kader POSYANDU.

- b) Konsumsi

Konsumsi merupakan pengiriman makanan dari masyarakat untuk para pekerja yang membuat rabat beton jalan. Pengiriman konsumsi ini merupakan bukti partisipasi perempuan dalam pelaksanaan PNPM-MD di Desa Panggeldangu. Pengiriman konsumsi juga secara bergilir, setiap KK pasti akan mendapat giliran untuk mengirimkan konsumsi berupa makanan ringan maupun makanan berat.

c) Pikiran

Bentuk swadaya masyarakat dalam bentuk pemikiran memang tidak dapat berbentuk secara nyata dalam bentuk barang tetapi dapat diluapkan dengan pengajuan gagasan/usulan dalam PNPM-MD. Bentuk swadaya pikiran bisa dilakukan oleh kaum laki-laki dan perempuan tanpa adanya pembedaan. Swadaya pikiran selain dalam pengajuan gagasan dalam PNPM-MD juga terlihat dalam bentuk pembuatan pengajuan usulan PNPM-MD.

- 3) Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan atau program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokrasi. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program atau kebijakan.

Penerapan disposisi dalam partisipasi masyarakat telah berjalan dengan baik. Kejujuran, komitmen dan demokrasi dalam PNPM-MD

telah dilaksanakan. Kejujuran dalam pelaksanaan PNPM-MD dapat terlihat dari adanya pembuatan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan penggunaan dana yang semestinya. Selain itu juga adanya transparansi membuktikan bahwa pelaku PNPM-MD dapat mengetahui secara rinci atas penggunaan dana pelaksanaan PNPM-MD.

Pengawasan dari masyarakat juga menjadi gambaran penerapan transparansi sehingga dalam pelaksanaan PNPM-MD sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Adanya komitmen yang tinggi dari masyarakat dalam ikut serta dalam pelaksanaan PNPM-MD yaitu mereka mengikuti hingga akhir pelaksanaan sehingga tidak ada kendala yang terjadi mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM-MD Desa Panggeldlangu.

Penerapan pemokrasi dapat terlihat dari pengambilan keputusan dalam pengajuan usulan PNPM-MD yaitu berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat. Kebebasan berpendapat serta pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat merupakan penerapan demokrasi dalam PNPM-MD. Adanya PNPM-MD merupakan program yang menjunjung demokrasi karena program ini seyogyanya untuk masyarakat, oleh masyarakat serta kemanfaatannya juga akan dirasakan oleh masyarakat.

- 4) Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup

dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan.

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan PNPM-MD tidak berbelit-belit. Pada dasarnya pelaku PNPM-MD utama yaitu masyarakat tetapi dengan adanya pembentukan struktur organisasi pada PNPM-MD tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan PNPM-MD Desa Panggeldlangu.

Adanya struktur organisasi dalam PNPM-MD dipilih atas dasar musyawarah dari masyarakat. Pengambilan keputusan usulan tetap berdasarkan musyawarah bersama masyarakat meskipun terdapat struktur organisasi, bahkan dalam pelaporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan PNPM-MD juga tidak berbelit-belit karena pertanggungjawaban juga secara langsung dipertanggungjawabkan kepada kepala desa dan masyarakat.

Mekanisme dalam tahap-tahap PNPM-MD yang dilaksanakan di Desa Panggeldlangu telah sesuai dengan ketentuan dari PNPM-MD. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban laporan kegiatan telah menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Pengelola organisasi PNPM-MD dapat menjalankan tugasnya dengan baik, kecuali tim TPU yang sudah tidak berfungsi sejak tahun 2010. Hal tersebut tidak menjadi kendala dalam

PNPM-MD di Desa Panggeldlangu, kerana tanpa adanya TPU pengajuan usulan tetap berjalan.

Pada dasarnya partisipasi masyarakat dalam PNPM-MD di Desa Panggeldlangu telah memenuhi dalam prinsip dasar PNPM-MD. Pelaksanaan PNPM-MD sudah menerapkan berbagai aspek prinsip dasar PNPM-MD, yaitu bertumpu pada pembangunan masyarakat ini terlihat dari kegiatan PNPM-MD yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, partisipasi yaitu masyarakat terlihat dalam pelaksanaan PNPM-MD, kesetaraan dan keadilan gender yaitu tidak ada pembedaan gender dalam tahap-tahap PNPM-MD baik dari perencanaan maupun pelaksanaan PNPM-MD, demokratis yaitu pengambilan keputusan PNPM-MD secara musyawarah dengan masyarakat, transparansi yaitu adanya keterbukaan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PNPM-MD, bahkan pelaporan pertanggungjawaban itu dihadiri oleh masyarakat dan ditempel di papan pengumuman desa.